



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIUS SUDARYOKO
2. Jabatan : SENIOR VICE PRESIDENT
3. NHK : 215891

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 6.423.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/80 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 352 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah Seluas 384 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BONTANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 33 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 843.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 38 m2/38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/123 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 898.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. MOBIL, TOYOTA SUN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	55.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	64.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	179.828.523
F. HARTA LAINNYA	Rp.	32.425.995
Sub Total	Rp.	7.652.254.518
III. HUTANG	Rp.	1.228.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.424.254.518

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.